

ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH
(Studi Kasus Pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara
Kabupaten Pringsewu)

(Skripsi)

Oleh
YORI TIRTA KUSUMA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT (CASE STUDY IN PAGELARAN SUB-DISTRICT AND NORTH PAGELARAN SUB-DISTRICT, DISTRICT PRINGSEWU)

By

Yori Tirta Kusuma

Since the fall of the New Order regime in 1998, Indonesia started the implementation of a more democratic government. The democratization led to a change from the centralized system of government to decentralized. The implication is that there is a shift in the locus of power from the central government to the regions government. According to Mariana and Paskarina (2008: 180) the formation of new autonomous regions is often based on consideration of economic indicators, such as income levels, economic activities, and the potential of natural resources. While the political dimension later emerged after the autonomous region was formed. The formulation of the problem in this research are: (1) What is the condition of regional development in Pagelaran sub-district and North Pagelaran sub-district? (2) Is there any difference of regional development between Pagelaran sub-district and North Pagelaran sub-district?

The steps undertaken by the researcher to conduct this research was to find data in the Pagelaran sub-district and North Pagelaran sub-district. To get the data of research subjects that really suit the characteristics of research subjects, such as population (education), area, control range, economic activities, and facilities and infrastructure. The process of data retrieval was done by observation and documentation. The data analysis used in this research was quantitative approach, it is a research method based on the nature of positivism, it is used to examine the specific population or a sample with purpose to test the hypothesis that has been defined and generalized.

The result of this research showed that: (1) (1) North Pagelaran sub-district in terms of the development of the region is good. However, there are still some developments that are still low based on the indicators. (2) The result of hypothesis test on whether or not there is a difference of regional development between Pagelaran and North Pagelaran sub-district based on the indicators using *chi-square goodness of fit* test stated that there is a difference of regional development between Pagelaran sub-district and North Pagelaran sub-district.

Keywords: regional development

ABSTRAK

ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH (STUDI KASUS PADA KECAMATAN PAGELARAN DAN KECAMATAN PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU) OLEH

YORI TIRTA KUSUMA

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia memulai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi tersebut membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 180) terbentuknya daerah-daerah otonom baru seringkali hanya didasarkan pada pertimbangan atas indikator-indikator ekonomi, seperti tingkat pendapatan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan dimensi politik yang kemudian muncul setelah daerah otonom itu terbentuk baru dipikirkan kemudian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kondisi perkembangan wilayah di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara? (2) Adakah perbedaan perkembangan wilayah antara Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan Pagelaran Utara?

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dengan cara mencari data di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara. Untuk mendapatkan data subjek penelitian yang benar-benar sesuai dengan karakteristik subjek penelitian, yaitu penduduk (pendidikan), luas daerah, rentang kendali, aktivitas ekonomi, serta sarana dan prasarana. Proses pengambilan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang memiliki tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan digeneralisasikan.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini bahwa: (1) Kecamatan Pagelaran Utara dari segi perkembangan wilayahnya sudah baik. Tetapi masih ada beberapa perkembangan yang masih rendah berdasarkan indikator. (2) Hasil uji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara berdasarkan indikator yang digunakan melalui uji *chi-square goodness of fit* menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

Kata Kunci : perkembangan wilayah

**ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH
(Studi pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara
Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

YORI TIRTA KUSUMA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH**
(Studi pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan
Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa : **Yori Tirta Kusuma**

No. Pokok Mahasiswa : 1116041100


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

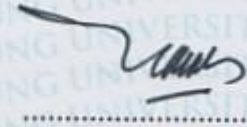


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Mei 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gadingrejo, 27 April 2017

Yang membuat pernyataan,



Yori Tirta Kusuma

NIP. 1116041100

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yori Tirta Kusuma, terlahir di keluarga yang sederhana sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Supriyoko dan Ibu Tri Rahayu. Penulis dilahirkan pada hari rabu tanggal 5 Mei 1993 di Kabupaten Pringsewu. Pada tahun 1998, penulis memulai pendidikan dasar di SD N 8 Wonodadi. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gadingrejo dan pada akhirnya penulis mengakhiri proses wajib belajar Sembilan tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gadingrejo. Semua penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Pada tahun 2011 berkat ridho Allah SWT penulis lulus dalam seleksi Ujian Masuk Lokal di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama menimba ilmu di Kampus Hijau penulis tercatat aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan maupun organisasi diluar universitas diantaranya: Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) periode 2013-2014 sebagai anggota Bidang Dana dan Usaha. Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Gita Praja Saburai (GPS) Provinsi Lampung periode 2011-2013. Selanjutnya tim pelatih drum band Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten

Tanggamus periode 2011-2014, dan Scooter Owners Group (SOG) Indonesia Cabang Lampung sebagai anggota aktif periode 2013 sampai sekarang.

Singkat kata sampai karya ini penulis buat, sudah cukup puas rasanya penulis menjadi bagian dari “Kampus Hijau” Universitas Lampung. Walaupun kata cukup sebenarnya tidak pernah ada, namun penulis rasa sudah saatnya mengatakan selamat tinggal pada dunia kampus dan memulai babak baru yang mungkin sejatinya merupakan awal dari apa yang dinamakan “Hidup”. Penulis yakin bahwa apa yang sudah kita dapat di dunia kampus selama menjadi mahasiswa, baik itu dalam proses belajar atau berorganisasi di dalam maupun diluar Universitas bisa diambil manfaat, setidaknya membuat penulis mempunyai bekal awal untuk melangkah pada kehidupan selanjutnya.

MOTTO

“Kesuksesan pasti akan dapat diraih jika kamu mau berusaha dan bersungguh-sungguh yang disertai dengan doa, karena semua apa yang kamu kerjakan itulah yang akan merubah nasibmu tanpa adanya usaha dan kesungguhan. Bukan karena nasib yang tidak menjadikanmu sukses”

(Yori Tirta Kusuma)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”

(Ernest Newman)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Heather Pryor)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka. Selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putramu tercinta dalam setiap sujudmu. Terima kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak. Doamu hadirkan keridhaan untukku, petunjukmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu dan seabit doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Perkembangan Wilayah (Studi Kasus pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih banyak atas saran, masukan, motivasi dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Novita Tresiana, M.Si selaku dosen pembahas. Terima kasih ibu atas arahan, saran, masukan, waktu, kesabaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.
6. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi ini.
7. Pihak Kecamatan Pagelaran maupun Kecamatan Pagelaran Utara yang telah memberikan izin melakukan penelitian serta meminta data yang dibutuhkan peneliti, terima kasih atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku. Bapak dan Ibu yang tak pernah lelah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya untuk membiayai anaknya agar menjadi lebih baik. Terima kasih atas didikan yang telah kalian berikan selama ini. Doakan selalu anakmu, insyaallah saya akan sukses dan dapat dibanggakan.
9. Adik-adikku Rama Faiz Pangestu dan Rauuf Anugrah Akbar, tak terasa sekarang kalian sudah beranjak dewasa, tetap semangat untuk belajar dan yakinlah suatu saat kesuksesan akan ada digenggaman kita.
10. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku sewaktu di Taman Kanak-Kanak, sahabat SD, SMP, maupun SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tanpa pendidikan penulis tidak akan bisa mendapatkan cerita dan ilmu yang menghantarkan penulis sampai sekarang ini.

11. Saudara terdekat di dunia kampus Angkatan 2011 (Antimapia) Filardis Akbar, Dede Irawan, Ekky Ananda, Febby Ardiantika P, Pebie Putri, Aisyiyah Atamimi, Ratu Ratna Juwita, Novia Rosdiani, Ludfiana Dwi Kosari, Alisa, M. Risky Satria, M. Rosyid, Farrah Mardatila, Dannisa Inna Putrisia, Renita Kirana, Novilia, Rano Kurniawan, Toto Sudiyanto, Novi Nurkholis, Sigit Prasetyo, Wahyu Wahedi P, A. Panggo Wahyu P, Suci Aprodity, Amanda Ramadani, Fitri, Mut Mulyani, Fatma, Miftayuni R, Juzna Septia, Leli Juwiyah, Kiki Yoa Gunevi, Fredy Anggara, Frendy Kurniawan, M. Deni Kurniawan, Devin Yusef, David M, Widianara, M. Ikhsan, M. Trio Handie, Martina Bulan, Istiyana, Destriana Risky, Nisa Aprilia, Wulan Agesta, Ninda Agistia, Farah Anisa, Raras Efriyanti Putri, Andri Misna Aprilia, Cindy Celia Rakasiwi, Laras Ayuning Putri, Ade, Iid Apriliani, Rinanda Adi Saputra, M. Zachika Ericko, Rendy Pratama Putra, Nindia Pratiwi, Maria Nori Kristiani, M. Ibnu, Deo Wiranto, Eka, Seza Karlina, Hesty Zonna, Kartika Wulandari, Astri Korpri Yanti, Andi Haryono, Ririn Wulandari, Akbar Karomi Putra, Ahmed Adha S, Octa Cassabela, Okta, Lisa Sagita, Riza, Ria Eridanita Yasa, M. Faizal terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian semua.
12. Untuk teman-teman angkatan ANE 011 yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan studi, Ahmed, Akbar, Ririn, Andi, Farah Anisa, Ninda, Widi, Menceng, Frendy, Manda, Rosyid, Wahyu, Toto, Rano, M. Risky Satria, semoga kita semua diberi kemudahan dalam menyelesaikan studi ini, Amin.
13. Terima kasih untuk teman-teman 2009 Bang Hendi, Bang Fahmi, Bang Guruh, Bang Angga. Temen-temen 2010 Bang Desmon, Bang Begg, Mbak

Bunga, Bang Woro, Bang Ali, Bang Satria, Bang Aden, Bang Loy, Bang Samsu, Bang Adi, Bang Datas.

14. Temen-temen 2012 (Ampera), teman-teman 2013 (Alas Menara), teman-teman 2014 (Gelas Antik).

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis, Amin

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Desentralisasi	10
1. Pengertian Desentralisasi	10
B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	16
1. Pengertian Otonomi Daerah	16
2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	18
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	21
C. Tinjauan Tentang Pemekaran Wilayah	23
1. Pengertian Pemekaran Wilayah	23
2. Faktor-Faktor Penyebab Pemekaran Wilayah.....	25
3. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah.....	29
D. Kerangka Pikir	31
E. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33

B. Objek dan Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Skala Pengukuran Data	37
G. Definisi Operasional Variabel	37
H. Teknik Analisis Data	38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Pagelaran	40
1. Pendahuluan	40
2. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	41
3. Geografis	50
4. Monografi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	51
5. Bidang Kewilayahan	52
6. Bidang Kependudukan	52
7. Pemerintahan	54
8. Sarana Pendidikan	58
9. Sarana Tempat Ibadah	58
10. Bidang Pembangunan	59
11. Bidang Pemerintahan	59
12. Bidang Pelayanan	60
13. Bidang Ketentraman dan Ketertiban	60
14. Potensi Kecamatan Pagelaran	61
15. Kerajinan/Industri Kecil	61
16. Peternakan	62
17. Perikanan	62
18. Sosial Budaya	62
19. Bidang Olahraga	62
20. Fasilitas Sosial Lainnya	62
21. Kamtibmas	63
22. Data Program Keluarga Berencana	63
23. Pondok Pesantren	64
B. Profil Kecamatan Pagelaran Utara	64
1. Sejarah Singkat Kecamatan Pagelaran Utara	64
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Pagelaran Utara	64
3. Demografi dan Sosial Kecamatan Pagelaran Utara	66

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian	71
1. Deskriptif Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
2. Statistik Deskriptif Luas Daerah Kecamatan	74
3. Statistik Deskriptif Rentang Kendali/Jarak Kecamatan	78
4. Statistik Deskriptif Sarana dan Prasarana Kecamatan	81

B. Pembahasan.....	86
1. Indikator Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86
2. Indikator Luas Daerah	89
3. Indikator Rentang Kendali	89
4. Indikator Sarana Prasarana	91

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Operasional Variabel.....	38
Tabel 2. Jumlah Desa Dalam Kecamatan Pagelaran.....	42
Tabel 3. Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Pagelaran.....	44
Tabel 4. Daftar Nomer Rekening, Pekon, Kepala Pekon, Jabatan.....	56
Tabel 5. Luas Wilayah.....	57
Tabel 6. Wilayah Kecamatan Pagelaran Secara Administratif.....	65
Tabel 7. Kepadatan Penduduk Per Pekon.....	66
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa.....	67
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut.....	68
Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	69
Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
Tabel 13. Statistik Uji T Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
Tabel 14. Luas Daerah Kecamatan Pagelaran.....	74
Tabel 15. Luas Daerah Kecamatan Pagelaran Utara.....	75
Tabel 16. Statistik Uji T Luas Daerah.....	76
Tabel 17. Rentang Kendali/Jarak Kecamatan Pagelaran.....	77
Tabel 18. Rentang Kendali/Jarak Kecamatan Pagelaran Utara	78
Tabel 19. Statistik Uji T Rentang Kendali/Jarak Kecamatan	80
Tabel 20. Sarana Prasarana Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan	

Pagelaran Utara.....	81
Tabel 21. Statistik Uji T Sarana Prasarana.....	82

DAFTAR BAGAN

Bagan

Halaman

Bagan 1. Kerangka Pemikiran..... 31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia memulai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi tersebut membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi memiliki pengertian yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 118) kebijakan desentralisasi dalam era transisi mempunyai arti khusus bagi perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia karena kebijakan ini menjadi landasan yuridis pergeseran paradigma sentralistis ke arah desentralistis. Pemberlakuan kebijakan ini seolah-olah membawa harapan baru bagi pengaturan pola hubungan antara pusat dan daerah yang lebih demokratis. Adapun urusan-urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke daerah sebagai berikut, pertama urusan wajib yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup,

perumahan, penanaman modal, UKM, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi (kominfo), pertanahan, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kebudayaan, industri, perdagangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah juga menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk:

1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan;
2. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah;
5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah; serta
6. Menata daerah otonom baru (DOB).

Tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan.
2. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
3. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
6. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian diganti dengan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Secara administratif antara lain ialah persetujuan dari DPRD, bupati/walikota dan gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri.

Sedangkan persyaratan kewilayahan/fisik antara lain adalah (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, dan minimal (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa yang bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara

pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran daerah memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. (*Sumber : <http://www.bappenas.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2015*).

Tuntutan pemekaran wilayah sebenarnya bisa dilakukan baik dalam status daerah otonom ataupun status wilayah administratif. Tuntutan untuk menjadi daerah otonom diawali terlebih dahulu dengan terbentuknya beberapa propinsi administratif maupun kabupaten dan kecamatan. Penetapan wilayah administratif tersebut merupakan suatu proses penting untuk mendewasakan dan memperkuat kemampuan provinsi/kabupaten/kecamatan tersebut agar suatu saat dapat menjadi daerah otonom. Pertimbangan ini penting mengingat banyak daerah otonom, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kecamatan yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 180) terbentuknya daerah-daerah otonom baru seringkali hanya didasarkan pada pertimbangan atas indikator-indikator ekonomi, seperti tingkat pendapatan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan dimensi politik yang kemudian muncul setelah daerah otonom itu terbentuk baru dipikirkan kemudian. Salah satu bentuk pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemekaran kecamatan. Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat

dibandingkan desa/kelurahan serta mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat, di mana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi menempatkan masyarakat pada heterogenitas dan kompleksitas permasalahan dan urusan yang dihadapi.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No.19 Tahun 2008 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan kecamatan adalah: *(PP No.19 Th 2008 pasal 3)*

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur.

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berbenah diri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Salah satu faktor untuk meningkatkan hal tersebut adalah pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa paksaannya berdampak baik atau buruk terhadap efektivitas pelayanan masyarakat.

Salah satu bentuk dari pemekaran kecamatan adalah Kecamatan Pagelaran. Pagelaran merupakan salah satu kecamatan tertua dalam wilayah Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 16.335 Ha, yang pada awalnya menjadi satu dengan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Hingga saat ini Kecamatan Pagelaran Memiliki 22 Wilayah Pemerintahan Pekon dengan jumlah penduduk sebanyak 52.733 jiwa, terdiri dari 26.829 laki-laki dan 25.904 perempuan dari 13.407 kepala keluarga. Pusat Pemerintahan Kecamatan berada di Pekon Gumukrejo dengan jarak ± 6 km ke arah barat dari kota Pringsewu dan terletak antara 110-60M permukaan laut dengan suhu maksimum $20^0 - 25^0C$. Potensi yang dimiliki cukup beragam antara lain bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan berbagai macam hasil home industri seperti kerajinan rotan, sulam tapis, peretakan genting dan batu bata, makanan ringan dan sebagainya, namun sektor pertanian dan perikanan merupakan potensi yang paling menonjol di Kecamatan Pagelaran. Sejalan dengan semakin berkembangnya masalah pemerintahan di Pekon/Desa, serta pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan yang dirasakan sejak terbentuknya Kabupaten Pringsewu juga

untuk lebih meningkatkan kinerja pada pemerintahan dan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Pagelaran bagian utara, perlu dilakukan pengembangan atau pemekaran kecamatan, hal ini mengingat jarak tempuh antara pekon dengan ibu kota Kecamatan Pagelaran berjarak \pm 23 Km, maka perlu diadakan Pemekaran Kecamatan Pagelaran. Tanpa mengecualikan upaya-upaya yang telah dilakukan tadi, segenap masyarakat kecamatan Pagelaran bagian utara (10 pekon) terdiri dari 8 (delapan) definitif dan 2 (dua) pekon pemekaran yaitu Pekon Gunung Raya dan Pekon Way Kunyir. Melihat bahwa salah satu pilihan yang efektif adalah dengan membentuk kecamatan baru (pemekaran) yang terdiri dari beberapa pekon yang ada, agar upaya rentang kendali pelayanan prima kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2012 resmilah Kecamatan Pagelaran dimekarkan menjadi 2 wilayah Kecamatan yaitu Pagelaran dan Pagelaran Utara.

Sesuai Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pemekaran Wilayah, kecamatan di Kabupaten Pringsewu bertambah menjadi sebanyak sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, dan Kecamatan Pagelaran Utara. (*Sumber : Sesuai dengan Perkab No. 12 Tahun 2012*).

Pemekaran kecamatan yang semula satu hanya terdapat satu kecamatan kemudian di bagi menjadi dua kecamatan tidaklah hal yang mudah, dimana harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu di maksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda

pemerintahan. Untuk mengendalikan struktur pemerintahan yang modern dengan melihat keanekaragaman dan kompleksitas kecamatan, tentu di perlukan aparat yang tangguh dan terampil, organisasi pemerintahan yang mantap, mekanisme kerja yang efektif, keuangan yang memadai dan didukung dengan sarana dan prasarana dan kinerja yang memadai, akan dapat menciptakan kinerja kecamatan dan efektivitas pelayanan masyarakat serta percepatan pembangunan demi menciptakan kepuasan bagi masyarakat.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam ranah perkembangan wilayah yang akan dilakukan pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Oleh karenanya peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : Analisis Perkembangan Wilayah (Studi Kasus Pada Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi perkembangan wilayah di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara?
2. Adakah perbedaan perkembangan wilayah antara Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan Pagelaran Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi perkembangan wilayah yang ada di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara sesudah pemekaran wilayah.
2. Mengidentifikasi perbedaan perkembangan wilayah Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan Pagelaran Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau referensi bagi pemerintah maupun daerah-daerah lain yang ingin menjadi daerah otonom baru untuk dapat mempertimbangkan kemungkinan layak atau tidak untuk dimekarkan baik secara teknis, administratif, maupun fisik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*centrum*” atau pusat (Supriatna dalam Arenawati, (2014: 3). J.H.A. Logeman dalam Arenawati (2014: 3) memberikan konsepsi kelaziman desentralisasi itu dalam 2 macam, yaitu

1. Dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau “*ambtelijke decentralisatie*” yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan yang lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Desentralisasi Ketatanegaraan, atau “*Staatkundige decentralisatie*” sering disebut desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

Menurut Tambunan (2010: 30) pelaksanaan desentralisasi merupakan momentum baru percepatan pemekaran. Keinginan atau gerakan pemekaran jika dilakukan, bukan hanya eksistensi daerah mendapat pemekaran tetapi juga dimotivasi oleh

besarnya keinginan untuk memperoleh saluran dana kebawah via birokrasi yang formal (via APBD). Perebutan dana pembangunan ekonomi lokal (kebawah) baik karena alasan kultural ketidakadilan ataupun alasan utama mengapa satu kota, kabupaten, dan provinsi dimekarkan. Dengan demikian, kemauan seperti ini harus diartikan bahwa jangka panjang ada keinginan memperbaiki pelayanan publik. Dalam kaitan dengan keinginan daerah memperbaiki efisiensi pelayanan publik, perubahan pendekatan pembiayaan pemerintahan daerah dari *expenditure* ke *revenue sharing* sebaiknya perilaku birokrasi (*bureaucratic behavior*) dalam melihat perkembangan kota, kabupaten, dan provinsi. Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun *good governance* mulai dari akar rumput politik (Imawan dalam Haris, (2007: 39). Menurut Mahfud dalam Simanjuntak (2013: 66), desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.

Sementara itu, otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi. Rasyid dalam Haris (2007: 9) desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Supriyatna dalam Simanjuntak (2013: 67), mengutarakan bahwa desentralisasi selalu menyangkut persoalan kekuatan, dihubungkan dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah atau lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan pemerintah. Diungkapkannya lebih lanjut bahwa bentuk-bentuk desentralisasi dalam

praktiknya adalah 1) dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi pemerintahan yang berbentuk pemindahan beberapa kekuasaan administratif ke kantor-kantor daerah dari departemen pemerintah pusat, 2) devolusi atau desentralisasi politik, yakni pemberian wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional atau lokal, 3) delegasi, yaitu pemindahan tanggungjawab manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan pusat, 4) privatisasi, yaitu pemindahan tugas-tugas ke organisasi-organisasi sukarela atau perusahaan swasta baik yang bersifat mencari keuntungan maupun yang nirlaba.

Menurut Smith dalam Haris (2007: 71) pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan lokal. Diantara kepentingan daerah yang penting itu adalah terwujudnya persamaan politik (*political equality*), munculnya pemerintahan lokal yang bertanggungjawab (*local accountability*), dan responsifitas masyarakat setempat (*local responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif di tingkat lokal. Menurut Pakar yang lain, Rondinelli dan Cheema dalam Simanjuntak (2013: 68), mengemukakan bahwa desentralisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan dana administratif adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom, dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah (NGO/LSM).

Dalam bahasa yang lain, Litvack dan Seddon dalam Simanjuntak (2013: 68), menyatakan bahwa setidaknya ada lima kondisi yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi, yaitu 1) kerangka kerja desentralisasi

harus memperhatikan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggungjawab pemberian pelayanan oleh pemerintah daerah, 2) masyarakat setempat harus diberi informasi mengenai kemungkinan biaya pelayanan dan penyampaian serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah menjadi bermakna, 3) masyarakat memerlukan mekanisme untuk menyampaikan pandangannya yang dapat mengikat politikus, sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 4) harus ada system akuntabilitas yang berbasis pada publik dan informasi yang transparan yang memungkinkan masyarakat memonitor efektivitas kinerja pemerintah daerah, yang mendorong politikus dan aparatur daerah menjadi responsif, 5) instrument desentralisasi, seperti kerangka kerja institusional yang sah, struktur tanggungjawab pemberian pelayanan dan sistem fiskal antar pemerintah harus didesain untuk mendukung sasaran-sasaran politikus. Menurut Bryan dan White dalam Simanjuntak (2013: 68), pada kenyataannya ada dua desentralisasi, yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat politik. Desentralisasi administratif adalah delegasi wewenang pelaksanaan kepada pejabat tingkat lokal yang harus bekerja dalam batas rencana dan sumber anggaran, kekuasaan, dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan sifat hakikat jasa dan pelayanan tingkat lokal tersebut. Desentralisasi politik atau devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada pejabat setempat. Desentralisasi pada dasarnya menyangkut distribusi kekuasaan pemerintahan, sehingga dipandang sebagai masalah klasik dan paling menarik dalam kurun waktu yang lama dalam sejarah pemerintahan negara. James W. Fesler dalam Arenawati (2014: 3)

mengungkapkan desentralisasi sudah menjadi tradisi sejak jaman Aristoteles untuk memikirkan distribusi fungsi-fungsi antara pejabat-pejabat di ibu kota dengan pejabat-pejabat di wilayah geografik tertentu. Dasar dari inisiatif desentralisasi ini adalah untuk memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari pengambilan suatu keputusan (Sinaga dalam Arenawati, (2014: 3).

Model pemerintahan daerah yang menerapkan sistem desentralisasi, menurut Cheema dan Rondinelli dalam Arenawati (2014: 5) memiliki keuntungan yaitu :

1. Rencana program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan daerah dan kelompok yang beraneka ragam.
2. Dapat memotong pemusatan kekuasaan, otoritas dan penguasaan sumber-sumber berlebih, yang selama ini berada di pemerintah pusat.
3. Pengetahuan dan sensitivitas para pejabat pemerintah pusat mengenai masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan daerah akan lebih baik.
4. Dekatnya pemerintah dengan masyarakat memungkinkan terumuskannya program-program yang lebih realistis dan efektif.
5. Dimungkinkan terdapatnya tekanan yang lebih besar kepada pemerintah pusat, baik secara politik maupun administratif, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan daerah yang jauh dari ibu kota.
6. Dimungkinkan akan tingkat keterwakilan yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan sehingga dimungkinkan pula terdapatnya alokasi

sumber-sumber pemerintahan dan investasi yang lebih merata.

7. Memungkinkan adanya kemampuan administrasi yang lebih besar, baik di dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun lembaga-lembaga swasta yang ada di daerah.
8. Manajemen pemerintahan akan berjalan lebih efektif dan efisien.
9. Dimungkinkannya terbangunnya struktur yang lebih terkoordinasi secara efektif, baik di lingkungan pemerintahan maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait.
10. Partisipasi warga negara dalam perencanaan dan manajemen pembangunan akan lebih terlembaga.
11. Memungkinkan sistem administrasi di semua tingkatan untuk lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.
12. Pimpinan di tingkat lokal dapat meletakkan berbagai pelayanan kearah yang lebih didalam masyarakatnya, mengintegrasikan daerah-daerah terpencil ke dalam otonomi daerah, serta mengawasi dan menilai berbagai pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kearah yang lebih efektif.
13. Meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional.
14. Pelayanan dan barang-barang publik dapat disediakan secara efisien dengan biaya lebih murah.

Alasan perlunya desentralisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan menurut Sublihar dalam Arenawati (2014: 5) adalah :

- a. Menyangkut percepatan dan perpendekan jarak antara pemerintah sebagai pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayaninya.
- b. Menyangkut perpendekan jarak kontrol sekaligus pengendalian oleh masyarakat pada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang didalamnya termasuk pengelolaan sumber daya daerah, sehingga seluruh kebijakan publik yang diambil oleh seluruh pemerintah dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan bertujuan untuk mengurangi rentang kendali terhadap daerah-daerah agar pemerataan pembangunan serta pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 itu adalah disatu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan Rasyid dalam Haris (2007: 8). Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sarundajang (1999: 33), otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Koesoemahatmadja dalam Sarundajang (1999: 33), menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti “pemerintahan” (*besture*). Dalam literatur Belanda, otonomi berarti “pemerintahan sendiri” (*zelfregering*) yang oleh Van Vallenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Menurut Berman dalam Sarundajang (1999: 34), keotonomian tersebut tetap pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Sarundajang (1999: 35) adalah untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi yang dimaksud dengan otonomi daerah dapat disimpulkan adalah bagaimana hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat lewat pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan

semacamnya berlaku daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Penjelasan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan penjelasan UU Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Otonomi luas adalah keluasan daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja dalam Arenawati, (2014: 36). Dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama.

Selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya meliputi:

1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
2. Dana perimbangan keuangan
3. Sistem administrasi lembaga dan lembaga perekonomian negara
4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis
6. Konservasi
7. Standarisasi nasional

Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya Widjaja dalam Arenawati (2014: 36). Karena itu pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional Widjaja dalam Arenawati (2014: 37). Perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mewujudkan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, yang berupa :

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan dan pemerataan pembangunan.
4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Berdasarkan beberapa prinsip diatas peneliti menyimpulkan bahwa prinsip otonomi daerah harus mengedepankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang prinsip utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Iglesias dalam Arenawati (2014: 43) ada kurang lebih (lima) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah :

- a. Sumber daya mengacu pada manusia sebagai pembuat dan pelaksana program.

Di mana dalam sumber daya manusia ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki moral atau mentalitas yang lebih baik pula. Selain sumber daya manusia juga terdapat sumber daya yang berupa keuangan, peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Dalam keuangan daerah otonom harus dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik, dapat mencari sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD.

- b. Struktur, mengacu pada bagaimana stabilitas organisasi dibuat, di mana struktur yang ada harus efisiensi sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, harus adanya aturan yang jelas, pola hubungan yang jelas, sistem komunikasi dan informasi yang baik dan lain-lain. Dalam struktur juga meliputi manajemen, bagaimana organisasi dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan sampai pada pengawasannya.
- c. Teknologi, terkait dengan keluasan akan pengetahuan-pengetahuan terkini. Tidak sekedar penggunaan alat-alat yang canggih tetapi juga penambahan pengetahuan pada sumber daya manusianya. Dengan pengetahuan yang terus berkembang, otomatis dapat menciptakan program-program yang lebih kreatif dan inovatif.
- d. Daya dukung, hal ini terkait dengan kemampuan untuk menjadi aturan, perilaku, kebiasaan menjadi sesuatu yang potensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan budaya kerja yang diciptakan dalam sebuah organisasi.
- e. Kepemimpinan, kepemimpinan bisa menjadi faktor yang paling dominan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemimpin harus mampu

mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan peluang yang terbuka bagi pencapaian tujuan. Oleh karena diperlukan kualitas dan kemampuan memotivasi. Menurut Rasyid dalam Arenawati (2014: 44) kepemimpinan merujuk pada kapasitas seseorang untuk membangun kesadaran kolektif dari suatu komunitas atas keperluan mewujudkan cita-cita tertentu. Otonomi daerah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun keberdayaannya pun masih ditentukan oleh Pemerintah (Pusat), oleh karena itu, menilai otonomi daerah perlu juga menilai berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintah terhadap jalannya otonomi daerah. Menurut Maksum dalam Arenawati (2014: 44) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi daerah, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor hubungan keorganisasian yang tercipta dari adanya otonomi daerah
3. Faktor sumber daya implementasi
4. Karakter pihak-pihak yang menjalankan otonomi daerah baik dipusat maupun di daerah

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang ada tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi daerah yang memang dari beberapa faktor tersebut saling keterkaitan untuk mendukung keberhasilan dari otonomi daerah.

B. Tinjauan Tentang Pemekaran wilayah

1. Pengertian Pemekaran Wilayah

UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 5, telah diuraikan bahwa kriteria daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang secara teknis diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 85) Tuntutan untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan propinsi/kabupaten/kota yang baru dapat menggambarkan fenomena kebangkitan etnisitas sekaligus perebutan penguasaan sumber-sumber daya alam tertentu, seperti kelautan, bahan tambang, kehutanan, dan sebagainya. Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 181) pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kaloh (2007: 189) pemekaran daerah menjadi propinsi, kabupaten dan atau kota dapat dilihat dari tiga sisi logika:

- a. Logika formal (legislasi), memahami bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal undang-undang, sekaligus dengan undang-undang ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah yang berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi otonom.
- b. Logika realitas, memandang bahwa pembentukan daerah (tidak memandang apakah menjadi otonom atau menjadi daerah kawasan khusus) merupakan sesuatu yang benar-benar penting secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternatif terbaiknya hanyalah pembentukan daerah atau pemekaran wilayah.

- c. Logika politik, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial-politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah, dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengusung etnisitas daerah sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran. Etnisitas menjadi motor penggerak masyarakat daerah.

Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 180) wacana penataan wilayah dalam perspektif otonomi daerah berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah otonom yang secara normatif diatur dalam pasal 4 s.d. 8 (pembentukan daerah baru) dan pasal 9 s.d. 10 (pembentukan kawasan khusus).

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan prima, pemerataan pembangunan serta meminimalisir rentang kendali masyarakat yang memang jauh dari jangkauan pemerintahan daerah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pemekaran Wilayah

Menurut Kaloh (2007: 195), terdapat beberapa urgensi dari adanya pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan.

2. Memperpendek *span of control* (rentang kendali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali.
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dalam penilaian syarat teknis yang menentukan faktor dan indikator pembentukan kecamatan meliputi:

1. Penduduk
2. Luas Daerah
3. Rentang Kendali
4. Aktivitas perekonomian
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Menurut Warpani (1980: 14) penduduk merupakan faktor utama perencanaan, sehingga pengetahuan akan tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok dalam rancangan. Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya (United Nations dalam Lucas, 1990: 2). Penduduk adalah hasil tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan tingkat kematian. Demografi lazim digunakan untuk menyebut studi tentang sifat dan interaksi ketiga tingkat tersebut, serta pengaruh perubahan ketiganya terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk (Hawthorn dalam Lucas, 1990: 2).

Demografi adalah suatu studi statistik dan matematik tentang jumlah, komposisi dan persebaran penduduk, serta perubahan faktor-faktor ini setelah melewati kurun waktu yang disebabkan oleh lima proses yaitu : fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Meskipun analisis arah perkembangan masing-masing proses dan hasil akhir dari kelima proses ini masih bersifat deskriptif dan komparatif, tetapi tujuan jangka panjangnya adalah mengembangkan suatu kerangka teori yang akan menerangkan apa yang digambarkan dan diperbandingkan (Bogue dalam Lucas, 1990: 2). Demografi adalah suatu studi tentang jumlah, persebaran dan komposisi penduduk, serta perubahan ketiga faktor tersebut. Komponen-komponen perubahan semacam itu dapat dikenal sebagai natalitas, mortalitas, migrasi dan mobilitas sosial/perubahan status (Hauser dan Duncan dalam Lucas, 1990: 2). National Academy of Sciences di USA dalam Lucas (1990: 168), memasukkan kebijakan-kebijakan kependudukan yang bersifat responsif. Ini meliputi cara-cara pemerintah menanggapi perubahan penduduk, misalnya dengan membangun lebih banyak sekolah apabila jumlah anak sekolah meningkat. Menurut Lucas (1990: 169) kebijaksanaan yang langsung mempengaruhi variabel-variabel kependudukan secara langsung: misalnya, merangsang imigrasi dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penduduk. Naiknya tingkat pendidikan biasanya menurunkan fertilitas. Jadi, mewajibkan pendidikan hingga sekolah menengah secara tidak langsung akan mempengaruhi fertilitas. Menurut Rusli (1983: 1) Studi kependudukan (*Population Studies*) merupakan istilah lain bagi ilmu kependudukan yang digunakan disini. Studi kependudukan terdiri dari analisa-analisa yang bertujuan dan mencakup :

1. Memperoleh informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahannya.
2. Menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut, dan
3. Menganalisa segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu.

Introduksi istilah ilmu kependudukan sesungguhnya dimaksud untuk memberi pengertian yang lebih luas daripada demografi, karena sejumlah ahli telah menggunakan istilah demografi untuk menunjuk pada demografi formal, demografi murni, atau kadang-kadang demografi teoritis. Sidgwick dalam Munir (1986: 96) meletakkan dasar-dasar untuk lebih memantapkan teori kependudukan optimum yang dinamis, maka Cannan seorang ahli yang telah mengemukakan konsep “kependudukan optimum” dalam pengertian statis. Ia menegaskan pada suatu saat dapat dipastikan bahwa penduduk yang berada disebidang tanah tertentu akan konsisten dengan produktivitas terbesar daripada industri pada saat itu. Namun dalam pada itu pula ia menegaskan lagi bahwa eksistensi jumlah penduduk yang terlalu banyak atau jumlah penduduk yang terlampau sedikit biasanya tidak tampak jelas.

Menurut Prof. Lodge dalam Ahmadi (2016: 31) perkataan pendidikan dipakai dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, semua pengalaman itu adalah pendidikan. Seorang anak mendidik orangtuanya, seperti pula halnya seorang murid mendidik gurunya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan, atau kerjakan tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup maupun mati. Menurut Carter dalam Ahmadi

(2016: 32) pendidikan adalah (a) seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar (pengajaran), (b) ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Bernays dalam Ahmadi (2016: 200) menyatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat, antara lain :

- 1) *Information given to the public* (memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat);
- 2) *Persuasion directed at the public, to modify attitude and action* (melakukan persuasi kepada masyarakat dalam mengubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah);
- 3) *Effort to integrated attitudes and action of institution with its public and of public with the institution* (suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah).

3. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Menurut Mariana dan Paskarina (2008: 182) syarat pemekaran wilayah ada 2 aspek, yaitu:

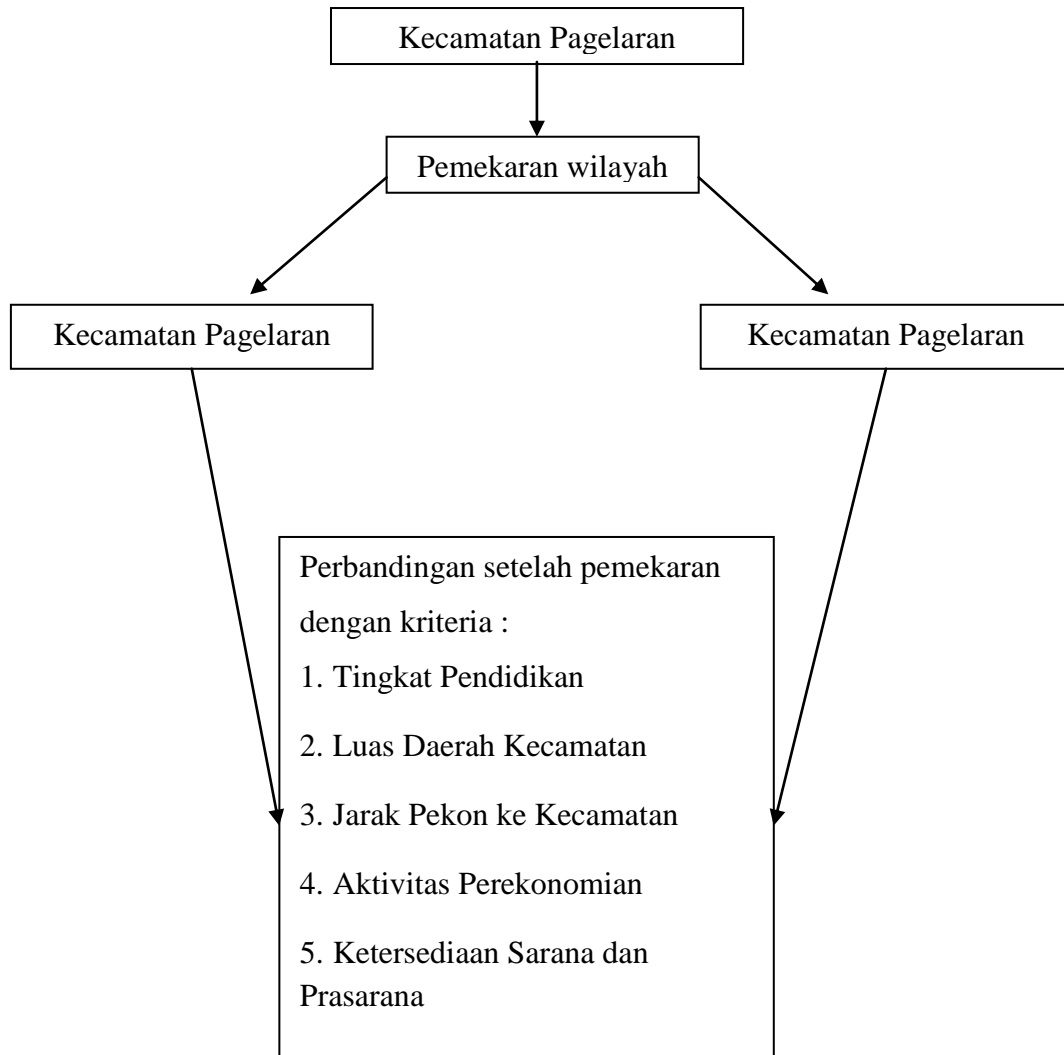
- a. Syarat teknis, meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Faktor lain antara lain

pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Syarat fisik, meliputi paling sedikit (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

D. Kerangka Pemikiran

Bagan 1: Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Surakhmad dalam Suyanto (2011: 43) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang tengah diteliti. Bila data yang terolah bisa disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan itu benar (karenanya dapat diterima), maka dicapailah konklusi. Peneliti mencoba merumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dengan
Kecamatan Pagelaran Utara

Ha : Terdapat perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan
Pagelaran Utara

Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai t (tabel) \geq dari nilai t (hitung), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika nilai t (tabel) \leq dari nilai t (hitung), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Statistik uji diatas mengikuti t dengan $df = (n-k-1)$. Dimana t tabel yang diperoleh dari daftar tabel distribusi t dengan $\alpha = 0,05$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal-komparatif (perbandingan) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Umar dalam Hikmat (2011: 41) penelitian kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Metode kuantitatif mempunyai maksud dalam usahanya menemukan pengetahuan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikasikan secara apriori. Untuk mengumpulkan data, metode kuantitatif memanfaatkan tes tertulis (tes-pensil-kertas) atau kuesioner atau menggunakan alat fisik lainnya seperti poligraf, dan sebagainya. Metode kuantitatif dapat menetapkan semua aturan pengumpulan dan analisis data sebelumnya.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan bahwa setelah terjadinya pemekaran wilayah apakah wilayah yang dimekarkan tersebut menjadi lebih baik dalam mensejahterakan masyarakatnya dibandingkan sebelum adanya pemekaran atau sebaliknya yang masih bergantung kepada kecamatan yang lama.

Adapun objek penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto (2002: 108) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Sedangkan menurut Bohar Soeharto dalam Hikmat (2011: 60) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

2. Sampel Penelitian

Soeharto dalam Hikmat (2011: 61) sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah desa yang ada di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara. Dengan didasarkan pada beberapa kriteria seperti penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktifitas perekonomian, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *cluster sampling*

(sampling daerah). Menurut Hikmat (2011: 63) *cluster sampling* (sampling daerah) digunakan untuk mengambil sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2002: 107) Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama. Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi langsung di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dengan melihat bahwa setelah terjadinya pemekaran apakah ada perbedaan antara kecamatan lama (Kecamatan Pagelaran) dengan yang dimekarkan (Kecamatan Pagelaran Utara) didalam mensejahterakan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari Profil Kecamatan dan Profil Pekon Se-Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,

Rentang Kendali, Perekonomian, dan sarana prasarana Tahun 2014. Catatan-catatan, data statistik, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perkembangan wilayah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2002: 197) Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution dalam Hikmat (2011: 73) teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

2. Dokumentasi

Menurut Meleong dalam Hikmat (2011: 83) bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku atau literature, arsip maupun dokumen dari

Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

F. Skala Pengukuran Data

Menurut Prasetyo (2012: 89) proses pengukuran merupakan suatu proses deduktif. Peneliti berangkat dari suatu konstruksi, konsep atau ide, kemudian menyusun perangkat ukur untuk mengamatinya secara empiris. Dalam penelitian ini skala pengukuran data yang digunakan adalah skala rasio. Menurut Prasetyo (2012: 96) pengukuran rasio selain ketiga hal yang merupakan ciri tingkatan pengukuran di atas, juga memiliki nol mutlak sehingga memungkinkan perkalian dan pembagian. Titik nol ini menunjukkan ketiadaan sama sekali variable yang hendak diukur. Pada penelitian ini skala rasio digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, dan sarana prasarana.

G. Definisi Operasional Variabel

Menurut Bernard S. Philips dalam Suyatno (2011: 51) sebuah konsep baru akan disebut konsep yang operasional jika konsep itu sudah menyatakan secara eksplisit konsekuensi metode operasinya. Operasional variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis variabel untuk dapat diteliti atau diukur.

TABEL 1
OPERASIONAL VARIABEL

Variabel	Konsep	Indikator
Perkembangan Wilayah	Upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional	1. Tingkat Pendidikan 2. Luas daerah Kecamatan 3. Jarak Pekon ke Kecamatan 4. Aktivitas ekonomi 5. Sarana dan Prasarana

H. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, regresi, serta membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dalam statistik deskriptif penyajian data dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan presentase Sugiyono (2010: 148).

2. Statistik Inferensial

Statistik Inferensial menurut Sugiyono (2010: 148), merupakan teknik statistik yang berfungsi untuk menganalisis suatu data sampel dan hasilnya diberlakukan

untuk populasi. Statistik inferensial diberlakukan untuk seluruh populasi yang didasarkan pada data sampel sehingga kebenarannya disebut dengan peluang.

Uji Chi-Square Goodnes Of Fit

Uji Chi-kuadrat merupakan suatu metode statistik nonparametrik yang berarti data terdistribusi secara bebas. Hal ini berarti tidak diperlukan adanya asumsi mengenai bentuk dari populasi yang sesungguhnya dari mana sampel ditarik. Uji statistik yang digunakan adalah variabel acak chi-kuadrat (*chi-square random variabel*) yang memiliki simbol X^2 melalui rumus berikut :

$$\chi^2_{hitung} = \sum \left(\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \right)$$

Dimana :

O_i = frekuensi yang diamati untuk level ke-i

E_i = frekuensi yang diharapkan untuk level ke-i

(Sumber : Morissan, 2012:309)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL KECAMATAN PAGELARAN

1. Pendahuluan

Pagelaran merupakan salah satu Kecamatan tertua dalam wilayah Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 16.335 Ha, yang pada awalnya menjadi satu dengan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Hingga saat ini Kecamatan Pagelaran memiliki 22 wilayah pemerintahan pekon dengan jumlah penduduk sebanyak 52.733 jiwa, terdiri dari 26.829 laki-laki dan 25.904 perempuan dari 13.407 kepala keluarga.

Secara administratif Kecamatan Pagelaran berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu dan Pardasuka
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung

Pusat Pemerintahan Kecamatan berada di Pekon Gumukrejo dengan jarak ± 6 km kearah Barat dari Kota Pringsewu dan terletak antara 110-60 M permukaan laut dengan suhu maksimum $20^0 - 25^0$ C. potensi yang dimiliki pun cukup beragam antara lain bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan berbagai macam hasil industri rumahan seperti kerajinan rotan, sulam tapis, peretakan genting dan batu bata, makanan ringan dan sebagainya, namun sektor pertanian

dan perikanan merupakan potensi yang paling menonjol di kecamatan pagelaran ini. Prestasi yang diraih dalam berbagai kegiatan lomba pekon tingkat kabupaten maupun provinsi dalam berbagai bidang juga cukup menggembirakan, artinya dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan pagelaran tidak tertinggal dengan kecamatan lainnya.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Kecamatan Pagelaran berdiri sekitar tahun 1905, yang pada waktu itu masih termasuk wilayah Sumatera bagian Selatan.

Sumatera bagian Selatan antara lain terdiri dari :

1. Kewedanan Gedung Tataan
2. Kewedanan Kota Agung
3. Kewedanan Kalianda

Kewedanan Gedung Tataan terdiri dari :

1. Kecamatan Pagelaran, sejak tahun 1950, kantor kecamatannya ada di Pagelaran
2. Kecamatan Gadingrejo
3. Kecamatan Kedondong

Pada waktu itu yang masuk Kecamatan Pagelaran adalah :

1. Negeri Pagelaran, yang wilayahnya mencakup Pugung dan Pagelaran
2. Negeri Pagelaran dipimpin oleh Kepala Negeri yang bertempat di wilayah Pugung (Rantau Tijang)
3. Negeri Pringsewu, yang wilayahnya mencakup Pringsewu, Pardasuka, Ambarawa, Sukoharjo, dan Banyumas

Setelah Provinsi Lampung berdiri sendiri dan lepas dari wilayah Sumatera bagian Selatan pada tahun 1964, maka secara administratif, Kecamatan Pagelaran juga menginduk kepada pemerintah Provinsi Lampung.

Sebagai persiapan untuk berdirinya Kecamatan Pagelaran, pada waktu itu tahun 1966 ditunjuk pelaksana tugas sebagai camat Pagelaran untuk mempersiapkan Kecamatan Pagelaran Definitif, adalah Bapak Abdul Hamid (Alm) yang berdomisili di Pagelaran, dan kantor Kecamatan Pagelaran kemudian pindah dari Pagelaran ke Rantau Tijing.

Tabel 2. Jumlah desa dalam Kecamatan Pagelaran waktu itu berjumlah 24 desa, yaitu :

1. Pagelaran	7. Lugasari	13. Kemilin	19. Banjar Agung
2. Gumukmas	8. Sukaratu	14. Fajar Baru	20. Way Jaha
3. Patoman	9. Karang Sari	15. Rantau Tijing	21. Tangkit Serdang
4. Panutan	10. Margosari	16. Tanjung Kemala	22. Tanjung Heran
5. Bumiratu	11. Giri Tunggal	17. Tanjung Agung	23. Wayngison
6. Candiretno	12. Sumber Bandung	18. Tiuh Memon	24. Babakan

Kecamatan Pagelaran pada asalnya termasuk dalam Eks Marga Pugung dengan pusat pemerintahannya di Rantau Tijing. Marga Pugung ini pada mulanya terdiri dari 5 kampung yaitu :

1. Rantau Tijing
2. Tanjung Kemala
3. Tiuh Memon
4. Banjar Agung

5. Tanjung Heran

Dengan wilayah yang meliputi beberapa kecamatan yang ada sekarang antara lain Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pugung. Kelima kampung tersebut mempunyai ikatan-ikatan tertentu baik mengenai wilayah maupun persamaan tata cara serta norma-norma yang berlaku hingga terbentuknya satu masyarakat hukum yang disebut marga yaitu “Marga Pugung”.

Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1940 pendatang dari luar Lampung yaitu kolonisasi dari Pulau Jawa meminta izin kepada Kepala Marga untuk menempati sebagian wilayah yang sekarang yaitu Pekon :

1. Pekon Gumukmas
2. Pekon Panutan
3. Pekon Patoman
4. Pekon Pagelaran

Bagi masyarakat pendatang dari Pulau Jawa dibawah Marga ada perbedaan dalam hubungan adat untuk memasuki adat Lampung yang Geneologis dan tegas itu, disamping itu teritorial surat pengakuan dari masyarakat Jawa. Apabila belum mengadakan pengakuan tersebut maka masyarakat tidak mempunyai ikatan terhadap marga, sehingga dalam pemilihan kepala marga, kepala-kepala kampung jawa tidak memiliki hak aktif.

Perubahan susunan Pemerintahan di Lampung sudah terjadi sejak tahun 1952 seiring dengan perginya penguasa Belanda yang digantikan oleh bangsa Jepang hingga kemerdekaan RI tercapai dikenal hanya satu Pemerintahan yaitu Residen, Wedana, dan Camat. Ditingkat bawah susunan marga tetap ada sampai peraturan Residen Lampung No. 153/D/1952 tanggal 2 September 1952 tentang

Pembentukan Negeri yang merupakan penggabungan dari beberapa marga, sehingga dengan demikian Marga Pugung terbentuk menjadi suatu negeri dengan nama Negeri Pugung yang dikepalai oleh Kepala Negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui tentang perkembangan Negeri Pugung ini sebagai berikut :

1. SUTRISNO
2. Hi. DURACHMAN
3. TUBAGUS ARSAD
4. IBRAHIM PAKSI AGUNG

Sehubungan penghapusan dan pengangkatan Pemerintahan Marga ini meliputi negeri atas dasar pertimbangan sosial ekonomi dan politik, namun diduga akan terjadi dan mungkin terjadi efek negatif yaitu terdapatnya tendensi melemahkan koordinasi dalam hubungan kerja pada tingkat kampung sehingga dengan melalui berbagai kritik sistem kenegerian tidak dapat bertahan lama yaitu adanya dualisme pemimpin pada tingkat yang lebih tinggi kampung yaitu Kecamatan dan Kenegerian.

Berdasarkan peraturan yang ada maka kepala negeri sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dijabat oleh Camat dan sejalan dengan hal tersebut kepala Negeri Pugung ini dijabat oleh Camat Pagelaran seiring dengan dihapuskannya pemerintahan negeri dengan SK Gubernur Lampung No. A/1570/1.1/218/TP/372 tanggal 18 Maret 1972.

Tabel 3. Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Pagelaran :

1	Bapak PUJO JATMIKO	(Tahun 1967-1968)
---	--------------------	-------------------

2	Bapak MANGKU RATU	(Tahun)
3	Bapak HASAN ANWAR	(Tahun 1968-1970)
4	Bapak R. RANI	(Tahun)
5	Bapak HASBULLAH	(Tahun)
6	Bapak SALEH	(Tahun 1970-1972)
7	Bapak A. RONI	(Tahun)
8	Bapak A. HASYIM	(Tahun 1972-1976)
9	Bapak MAHYUDIN ALWI, BA	(Tahun)
10	Drs. A. RASYID	(Tahun 1976-1980)
11	Bapak RIDWAN NAWAWI	(Tahun 1980-1984)
12	Bapak MARYANTO	(Tahun 1984-1989)
13	Bapak HABIBURAHMAN	(Tahun 1989-1993)
14	Bapak NURDIN ISMAIL	(Tahun 1993-1994)
15	Bapak SAIFUDIN BASRI	(Tahun 1994-1996)
16	Bapak ASHABUL YAMIN	(Tahun 1996-1999)
17	Bapak IDHAM KHOLIQ, AZ, SH	(Tahun 1999-2000)
18	Bapak Drs. AHYAR HARIS, MM	(Tahun 2000-2004)
19	Bapak SYAFRUDDIN, M	(Tahun 2004-2006)
20	Bapak Drs. SAMSUL RIZAL	(Tahun 2006-2008)
21	Bapak Drs. ANANTO PRATIKNO, MM	(Tahun 2008-2009)
22	Bapak EDI SUMBER PAMUNGKAS, S.Sos	(Tahun 2009-2010)
23	Bapak Drs. AHMAD BASRI, SE	(Tahun 2010-2011)

24	Bapak M. KHOTIM, SE	(Tahun 2011-2013)
25	Bapak Drs. MASYKUR, MM	(Tahun 2013-2014)
26	Bapak Hi. SUKRI, SE	(Tahun 2015-sekarang)

Masyarakat Pagelaran terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu :

Penduduk asal Lampung dan penduduk pendatang yang berasal dari Jawa, Sumatera Selatan dan lain suku dari Luar Daerah Lampung. Menurut perbandingan 21% penduduk asli Lampung dan 79% penduduk pendatang.

Pagelaran merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan memiliki jumlah desa banyak di Kabupaten Pringsewu. Sejarah awal Kecamatan pagelaran dimulai ketika masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan karena luas wilayah yang sangat besar, maka Kecamatan pagelaran mengalami Pemekaran menjadi dua yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pugung. Kemudian pada tahun 1998 Kabupaten Lampung Selatan mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Tanggamus, maka Pagelaran termasuk dari 11 kecamatan yang ikut dalam Kabupaten Tanggamus dengan jumlah desa/pekon 20 pekon yaitu ; Candiretno, Tanjung Dalam, Way Ngison, Karangsari, Gumukmas, Patoman, Pagelaran, Sukaratu, Sukawangi, Lugusari, Panutan, Bumiratu, Fajarbaru, Kemilin, Neglasari, Sumber Bandung, Giri Tunggal, Margosari, Pasir Ukir, Madaraya, Pamenang, dan Gemahripah.

Semakin berkembangnya pemerintahan dan semakin komplitnya masalah yang berkembang dimasyarakat, maka jumlah pekon di Pagelaran bertambah sejalan dengan jumlah pemekarannya sejumlah pekon menjadi 2 (dua) wilayah dan sejak itu jumlah pekon yang ada di Kecamatan Pagelaran menjadi 24 pekon yaitu :

Candiretno, Tanjung Dalam, Way Ngison, Karang Sari, Gumukmas, Patoman, Pagelaran, Sukaratu, Sukawangi, Lugusari, Panutan, Bumiratu, Fajarbaru, kemilin, Neglasari, Sumber Bandung, Giri Tunggal, margosari, Pasir Ukir, Madaraya, Pamenang, Gemahripah, Gumukrejo dan Fajar Mulya.

Setelah 11 tahun bergabung dengan Kabupaten Tanggamus maka pada tahun 2008 Kabupaten tanggamus memekarkan wilayah pemerintahannya menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten tanggamus dan Kabupaten Pringsewu. Secara Geografis maka Pagelaran kembali mengikuti Kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Pringsewu bersama 7 Kabupaten lainnya. Pada tahun 2011 Kacamatan Pagelaran memiliki 4 pekon yang baru yaitu :

1. Pekon Patoman dimekarkan menjadi Pekon Padang Rejo dan Pekon Patoman
2. Pekon Pagelaran dimekarkan menjadi Pekon Pujiharjo dan Pekon Pagelaran
3. Pekon Kemilin dimekarkan menjadi Pekon Gunung Raya dan Pekon Kemilin
4. Pekon Neglasari dimekarkan menjadi Pekon Way Kunyir dan Pekon Neglasari

Sejalan dengan semakin berkembang masalah pemerintahan di pekon/ Desa, serta pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan yang dirasakan sejak terbentuknya Kabupaten Pringsewu, maka perlu diadakan Pemekaran Kecamatan Pagelaran. Akhirnya pada 29 Agustus 2012 resmilah Kecamatan Pagelaran dimekarkan menjadi 2 wilayah Kecamatan yaitu Pegalaran dan Pagelaran Utara. Secara administratif pekon-pekon yang berada diwilayah Kecamatan induk yaitu Kecamatan Pagelaran terbagi pula menjadi :

Kecamatan Pagelaran memiliki 18 Pekon yaitu :

1. GUMUKMAS
2. GUMUKREJO

3. PANUTAN
4. PATOMAN
5. PAGELARAN
6. BUMI RATU
7. PAMENANG
8. KARANGSARI
9. TANJUNG DALAM
10. CANDI RETNO
11. GEMAHRIPAH
12. WAY NGISON
13. SUKARATU
14. SUKAWANGI
15. LUGUSARI
16. PASIR UKIR
17. PUJIHARJO
18. PADANG REJO

Kecamatan Pagelaran Utara memiliki 10 Pekon yaitu :

1. FAJAR BARU
2. FAJAR MULYA
3. KEMILIN
4. SUMBER BANDUNG
5. NEGLASARI
6. MADARAYA
7. MARGOSARI

8. GIRI TUNGGAL

9. GUNUNG RAYA

10. WAY KUNYIR

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012, di Kecamatan Pagelaran diadakan Pemekaran 4 wilayah Pekon yaitu :

1. Pekon Gumukrejo mekar dengan ganjaran
2. Pekon Bumiratu mekar dengan Pekon Bumirejo
3. Pekon Candiretno mekar dengan Pekon Sumberejo
4. Pekon Way Ngison mekar dengan Pekon Sidodadi

Hingga saat ini Kecamatan Pagelaran resmi mempunyai 22 Pekon/Desa yaitu :

1. GUMUKMAS
2. GUMUKREJO
3. PANUTAN
4. PATOMAN
5. PAGELARAN
6. BUMIRATU
7. PAMENANG
8. KARANGSARI
9. TANJUNG DALAM
10. CANDI RETNO
11. LUGUSARI
12. PASIR UKIR
13. WAY NGISON
14. GEMAHRIPAH

15. SUKAWANGI
16. SUKARATU
17. PADANG REJO
18. PUJIHARJO
19. SIDODADI
20. SUMBEREJO
21. BUMIREJO
22. GANJARAN

3. GEOGRAFIS

Kecamatan Pagelaran dengan ibu kota kecamatann yaitu Pagelaran termasuk dalam wilayah Kabupaten Pringsewu sejak awal Kecamatan Pagelaran dimulai ketika masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Karena wilayah yang sangat besar, maka Kecamatan Pagelaran mengalami pemekaran menjadi dua yaitu Kecamatan Pugung. Pada tahun 1998 Kabupaten Lampung Selatan mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Tanggamus. Maka Pagelaran termasuk dari dua Kecamatan yang ikut dalam Kabupaten Tanggamus. Semakin berkembang pemerintahan, maka 11 tahun kemudian Kabupaten Tanggamus menjadi Kabupaten Pringsewu dan Pagelaran kembali mengikuti Kabupaten Pringsewu bersama 7 kecamatan lainnya.

Posisi Kecamatan Pagelaran terletak \pm 40 KM kearah barat dari kota madya Bandar Lampung dan \pm 6 KM dari ibukota Kabupaten Pringsewu. Untuk menghubungkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Pagelaran dihubungkan oleh jalan-jalan yang pembangunannya dilakukan oleh provinsi Lampung sepanjang 62 KM, Kabupaten Pringsewu termasuk yang dulunya dibuat

oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus ketika masih bergabung sepanjang 41,25 KM dan Kecamatan Pagelaran sendiri sepanjang 244,75 KM.

Secara administratif Kecamatan Pagelaran berbatasan dengan daerah lainnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Sukoharjo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung

Luas wilayah Pagelaran sebelum pemekaran \pm 163,55 KM, dengan wilayah 24 pekon. Setelah adanya pemekaran kecamatan menjadi Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara, maka luas wilayah Kecamatan Pagelaran seluruhnya \pm 63,28 KM dengan 22 Wilayah Pemekonan.

4. MONOGRAFI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN

PRINGSEWU

1. Data Umum :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Nama Camat | : Hi. SUKRI, SE |
| b. Nama Sekcam | : Bahrudin, S.IP |
| c. Nama Kasi Pemerintahan | : Any Wijayanti, A.Md |
| d. Kasi Pemberdayaan | : Bambang Sutrisno |
| e. Kasi Pendapatan | : Yusman |
| f. Kasi Trantib | : Nasirun |
| g. Kasubag Umum dan Kepegawaian | : Prawoco |

h. Kasubag Perenc. Dan Keuangan : Tuminem, SE

5. BIDANG KEWILAYAHAN

1. Luas Wilayah Kecamatan : 63,16 Km²
2. Batas Wilayah Kecamatan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran Utara
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kec. Ambarawa dan Kec. Pardasuka
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu
 - e. Ketinggian tanah dari permukaan laut :
 - f. Suhu udara rata-rata : 28-32⁰ C
 - g. Jarak tempuh dari Kecamatan ke Kabupaten : 15 KM
 - h. Jarak tempuh dari Kecamatan ke Provinsi : 52 KM
 - i. Luas permukiman :
 - j. Jumlah pasar desa : 3
 - k. Jumlah pasar kabupaten : 1

6. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Jumlah KK : 13.389
2. Jumlah Penduduk
 - a. Laki-laki : 26.725 Jiwa
 - b. Perempuan : 25.757 Jiwa
 - c. Jumlah desa/pekon : 22 Pekon
 - d. Jumlah Dusun : 76 Dusun
 - e. Jumlah RW : 76 RW

f. Jumlah RT	: 226 RT
3. Jumlah penduduk berdasarkan agama	
a. Jumlah penduduk beragama Islam	: 50.836 Jiwa
b. Jumlah penduduk beragama Kristen	: 364 Jiwa
c. Jumlah penduduk beragama Khatolik	: 1.117 Jiwa
d. Jumlah penduduk beragama Hindu	: 412 Jiwa
e. Jumlah penduduk beragama Budha	: 17 Jiwa
4. Jumlah penduduk berdasarkan usia	
a. Jumlah penduduk usia 0-5 tahun	: 5.790 Jiwa
b. Jumlah penduduk usia 11-21 tahun	: 11.525 Jiwa
c. Jumlah penduduk usia 21 tahun keatas	: 33.796 Jiwa
5. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan	
a. Lulus SD	: 14.230 Jiwa
b. Lulus SMP	: 10.639 Jiwa
c. Lulus SMA/SMK	: 8.035 Jiwa
d. Lulus akademi (D1-D3)	: 880 Jiwa
e. Lulus sarjana (S1-S3)	: 595 Jiwa
6. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	
a. PNS	: 834 Jiwa
b. TNI/POLRI	: 73 Jiwa
c. Pegawai swasta	: 1.026 Jiwa
d. Wiraswasta/pedagang	: 2.357 Jiwa
e. Petani	: 10.961 Jiwa
f. Nelayan	: -

g. Buruh : 11.177 Jiwa

h. Pensiunan : 231 Jiwa

7. Jumlah penduduk berdasarkan mobilitas (kelahiran, kematian, perpindahan, pendatang)

a. Angka kelahiran pertahun : 462 Jiwa

Laki-laki : 244 Jiwa

Perempuan : 218 Jiwa

b. Angka kematian pertahun : 283 Jiwa

Laki-laki : 106 Jiwa

Perempuan : 177 Jiwa

c. Penduduk yang pindah pertahun : 86 Jiwa

Laki-laki : 48 Jiwa

Perempuan : 38 Jiwa

d. Penduduk yang datang pertahun : 105 Jiwa

Laki-laki : 53 Jiwa

Perempuan : 52 Jiwa

7. PEMERINTAHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2011 tentang rincian tugas dan fungsi serta tata kerja pemerintah kecamatan, maka susunan organisasi pemerintah kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Susunan kepegawaian Kantor Camat Pagelaran pada saat ini berjumlah 16 orang terdiri dari :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Camat (Eselon III a) | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan (Eselon III b) | : 1 Orang |
| 3. Kepala Seksi (Eselon IV a) | : 5 Orang |
| 4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV b) | : 2 Orang |
| 5. Staf golongan III/a | : 2 Orang |
| 6. Staf golongan II/d | : 1 Orang |
| 7. Staf golongan II/a | : 1 Orang |

Adapun jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan yang ada di kantor Camat Pagelaran adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Pegawai golongan IV | : 1 Orang |
| 2. Pegawai golongan III | : 10 Orang |
| 3. Pegawai golongan II | : 2 Orang |
| 4. Pegawai honorer daerah | : 4 Orang |
| 5. Pegawai TKS | : 3 Orang |

Pusat pemerintahan kecamatan berkedudukan di pekon Gumukrejo dengan jarak = 6 Km kearah Barat dari Kota Pringsewu dan terletak antara 110-600 Meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum 20-25⁰C .

Pagelaran merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah desa/pekon terbanyak di Kabupaten Pringsewu yaitu 22 Desa/pekon.

Tabel 4. Daftar Nomor Rekening, Pekon, Kepala Pekon, Jabatan

No	KODE PEKON	NAMA PEKON	NAMA KEPALA PEKON	TMT JABATAN
1	18.10.05.2001	Candi Retno	SUMARSO	18-12-2012
2	18.10.05.2002	Tanjung Dalam	M. ILMI	18-12-2012
3	18.10.05.2003	Wayngison	WAGIMAN	18-12-2012
4	18.10.05.2004	Sukawangi	SAMSUIDIN	29-03-2010
5	18.10.05.2005	Sukaratu	AZHARI	18-12-2012
6	18.10.05.2006	Pagelaran	MAHROM	18-12-2012
7	18.10.05.2007	Patoman	SUDIYONO	18-12-2012
8	18.10.05.2008	Karangsari	SUPRIYONO	21-03-2013
9	18.10.05.2009	Gumukmas	SURONO	18-12-2012
10	18.10.05.2010	Bumi Ratu	SUBANDI	12-02-2010
11	18.10.05.2011	Panutan	HARYONO	18-12-2012
12	18.10.05.2012	Lugusari	SARJONO	18-12-2012
13	18.10.05.2019	Pamenang	SUROTO	18-12-2012
14	18.10.05.2020	Gemahripah	MANISO	18-12-2012
15	18.10.05.2023	Pasir Ukir	DARWIS EKALAYA	02-12-2013
16	18.10.05.2024	Gumukrejo	WAGIMAN	02-12-2013
17	18.10.05.2027	Pujiharjo	RASIMIN	04-06-2012
18	18.10.05.2028	Padangrejo	TUKIMAN	04-06-2012

19	18.10.05.2029	Sidodadi	HARYATNO	06-09-2013
20	18.10.05.2030	Sumberejo	AHMAD AFANDI	06-09-2013
21	18.10.05.2031	Ganjaran	DARMAN	06-09-2013
22	18.10.05.2032	Bumirejo	TUGIMIN	06-09-2013

Tabel 5. Luas Wilayah

No	KODE PEKON	NAMA PEKON	LUAS WILAYAH
1	18.10.05.2001	Candi Retno	190,05 Ha
2	18.10.05.2002	Tanjung Dalam	432,60 Ha
3	18.10.05.2003	Wayngison	130,75 Ha
4	18.10.05.2004	Sukawangi	253,20 Ha
5	18.10.05.2005	Sukaratu	306,30 Ha
6	18.10.05.2006	Pagelaran	390,6 Ha
7	18.10.05.2007	Patoman	296,111 Ha
8	18.10.05.2008	Karangsari	586,30 Ha
9	18.10.05.2009	Gumukmas	226,00 Ha
10	18.10.05.2010	Bumi Ratu	540 Ha
11	18.10.05.2011	Panutan	190,00 Ha
12	18.10.05.2012	Lugusari	470,50 Ha
13	18.10.05.2019	Pamenang	410,00 Ha
14	18.10.05.2020	Gemahripah	125,00 Ha
15	18.10.05.2023	Pasir Ukir	526,00 Ha

16	18.10.05.2024	Gumukrejo	302 Ha
17	18.10.05.2027	Pujiharjo	121,5 Ha
18	18.10.05.2028	Padangrejo	76,25 Ha
19	18.10.05.2029	Sidodadi	104 Ha
20	18.10.05.2030	Sumberejo	48,60 Ha
21	18.10.05.2031	Ganjaran	286, Ha
22	18.10.05.2032	Bumirejo	270 Ha

8. SARANA PENDIDIKAN

Sarana Pendidikan di Kecamatan Pagelaran sebagai berikut :

- a. PAUD : 11 Buah
- b. Taman Kanak-kanak (TK) : 8 Buah
- c. Sekolah Dasar / MIN : 46 Buah
- d. SMP dan Swasta / MTS : 10 Buah
- e. SMA Negeri : 1 Buah
- f. SMK : 1 Buah
- g. SMA Swasta : 4 Buah

9. SARANA TEMPAT IBADAH

- 1. Masjid : 136 Buah
- 2. Surau / Mushola : 174 Buah
- 3. Gereja : 3 Buah
- 4. Kapel / Kuil : 3 Buah
- 5. Pura : 3 Buah

10. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kecamatan Pagelaran.
2. Memfasilitasi dan memonitoring kegiatan program PNPM-MPd dalam setiap tahapan.
3. Melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
4. Melaksanakan pendataan kelayakan 22 pekon yang ada di kecamatan Pegalaran.
5. Memfasilitasi Program Gemma Sewu Bersenyum Manis yang ada di Kecamatan Pagelaran yang meliputi 19 pekon.

Program kegiatan yang belum terlaksana di Kecamatan Pagelaran :

1. Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Pagelaran.
2. Pembangunan Tugu Mina Politan sebagai simbol bahwa Kecamatan Pagelaran sebagai komoditas terbesar dari sektor perikanan.
3. Pembangunan lanjutan Gedung PKK.
4. Pembangunan Pengadaan Sarana Air Bersih.

11. BIDANG PEMERINTAHAN

A. Bantuan Bidang Keagamaan

1. Jumlah guru mengaji yang diusulkan untuk mendapatkan insentif sebanyak 89 orang belum terealisasi.
2. Insentif PPN (Penghulu) sebanyak 22 orang masih dalam proses.
3. Masjid dan mushola yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 23 yang tersebar ke seluruh pekon.
4. Kegiatan pengajian triwulan dilaksanakan.

Programkerja yang belum terlaksana :

1. Penyusunan wacana pemekaran kecamatan Pegelaran Kabupaten Pringsewu yang sudah dilaporkan kepada Bupati.

12. BIDANG PELAYANAN

1. Membentuk tim untuk bersama-sama melaksanakan pembenahan kepada wajib pajak dalam rangka pencapaian target PBB.
2. Target PBB sebesar Rp. 167.204.844,-, pencapaian/realisasi Rp. 110.431.023,- dengan presentase 67 %. Dan sisa tunggakan PBB yang belum terbayarkan yaitu sekitar Rp. 53.654.004,- dengan presentase 33 %.
3. Membuat kesepakatan aturan kepada kepala pekon yang ada di kecamatan Pagelaran sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat, dimana setiap warga yang membuat KK dan KTP harus melampirkan tanda bukti lunas PBB.

13. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Melaksanakan bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi di Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pringsewu, melaksanakan penertiban timbangan yaitu timbangan gantung, timbangan duduk (Tera Ulang Timbangan) yang diadakan bulan Oktober 2014.
2. Melaksanakan pendataan dan penertiban jumlah dan wilayah pengoprasian mesin giling padi (HULLER) bergerak di wilayah Kecamatan Pagelaran.
3. Melaksanakan pendataan Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban perizinan di wilayah Kecamatan Pagelaran.

4. Melaksanakan pendataan guru ngaji yang berada di Kecamatan Pagelaran, sekaligus mengkoordinir pencairan dana/honor guru ngaji.
5. Melaksanakan pendataan Linmas di Kecamatan Pagelaran untuk mengikuti Pelatihan Linmas di Gor Mini Kabupaten Pringsewu.

14. POTENSI KECAMATAN PAGELARAN

Sebagai salah satu yang ada di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan pagelaran mempunyai potensi antara lain : bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, berbagai jenis industry rumahan seperti : pembuatan genting, kerajinan rotan, sulam tapis, dan berbagai jenis makanan ringan dengan lokasi tersebar di 22 pekon.

15. KERAJINAN / INDUSTRI KECIL

Dibidang ini masyarakat petani mempunyai kerja sambilan memanfaatkan bambu anyaman berupa alat keperluan rumah tangga, membuat kerajinan kursi rotan dan membuat tenun kerajinan tapis sebagai penunjang untuk kebutuhan rumah tangga.

Adapun jumlah industri yang ada di Kecamatan Pagelaran :

1. Penggiling padi : 40 Buah
2. Toko/warung/kios : 180 Buah
3. Rumah makan : 5 Buah
4. Counter HP : 13 Buah
5. Pengrajin jati : 5 Buah
6. Pengrajin rotan : 2 Buah
7. Pengrajin tahu : 12 Buah
8. Penggiling tahu : 5 Buah

16. PETERNAKAN

Peternakan yang paling berkembang di kecamatan Pagelaran adalah beternak ayam dan beternak kambing, usaha budidaya ini diminati oleh sebagian masyarakat, karena potensi untuk beternak cukup baik terutama didaerah perkebunan.

17. PERIKANAN

Kecamatan Pagelaran merupakan daerah yang cukup potensial untuk perikanan air tawar, usaha budidaya ini selain di kolam banyak juga masyarakat yang memanfaatkan lahan sekita rumah dengan membuat baik dari plastik terpal, hasilnya pun cukup lumayan.

18. SOSIAL BUDAYA

Masyarakat Pagelaran umumnya bersifat baik dalam bergotong-royong dan pembangunan pekon maupun masyarakat. Kegiatan jum'at bersih mulai digerakkan kembali guna terwujudnya kebersihan lingkungan dikantor-kantor dan jalan-jalan terutama jalan protokol dengan mengkondisikan pot bunga ditepi jalan protokol agar terkesan indah dan asri. Lembaga yang ada dipekon adalah PHP, LPM, PKK, dan karang taruna yang turut serta dalam mengisi kegiatan pembangunan pekon.

19. BIDANG OLAHRAGA

Di bidang olahraga pada umumnya yang paling dinikmati dan digemari oleh masyarakat Pagelaran adalah sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan lain-lainnya.

20. FASILITAS SOSIAL LAINNYA

Disamping fasilitas sosial yang ada telah diuraikan diatas seperti sarana pendidikan, agama, dan sarana tempat ibadah, juga terdapat fasilitas lainnya yaitu:

1. Gedung pertemuan/serba guna : 1 Buah
2. Gedung balai pekon : 18 Buah
3. Lapangan olahraga : 25 Buah
4. Gedung Kesehatan : 9 Buah

21. KAMTIBMAS

Keamanan dan ketertiban cukup baik dan kondusif/aman gangguan yang menimbulkan resahnya masyarakat relative kecil dan kenakalan remaja yang menonjol kecil presentasinya. Situasi politik stabil, aman serta kondusif. Saat ini ditingkat pekon telah terbentuknya pembantu babinkamtibmas di pekon, yaitu POLMAS (Polisi Masyarakat) yang bertugas untuk membantu polisi sektor pagelaran.

22. DATA PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Mengenai program keluarga berencana di Kecamatan Pagelaran cukup berhasil dan sukses. Masyarakat telah menyadari pentingnya berkeluarga berencana (KB).

Adapun rincian data keluarga berencana di Kecamatan Pagelaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pos/klinik KB : 13 Buah
- b. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) : 7.998 Buah
- c. Jumlah PUS masuk KB : 6.239 Buah
- d. Jumlah Posyandu : 64 Buah
- e. Jumlah akseptor : 6.053 Buah

Dengan rincian penggunaan kontrasepsi sebagai berikut :

a.Pil	: 1.748 Orang
b.IUD	: 2.193 Orang
c.Kondom	: 14 Orang
d.Suntik	: 1.460 Orang
e.MOP	: 112 Orang
f.MOW	: 120 Orang
g. KB Mandiri	: 356 Orang

23. PONDOK PESANTREN

a. jumlah produk pesantren	: 3 Buah
b. Jumlah Kyai	: 10 Orang
c. Jumlah santri	: 120 Orang

B. PROFIL KECAMATAN PAGELARAN UTARA

1. Sejarah Singkat Kecamatan Pagelaran Utara

Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonomi baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membantu daerah dalam pengelolaan wilayah Kecamatan Pagelaran Utara. Kecamatan Pagelaran Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Pagelaran dan berdiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara tanggal 10 Mei 2012. Pada tanggal 30 Agustus 2012 Bupati Pringsewu melantik Junaidi MS., SE sebagai Camat Pagelaran Utara yang pertama.

2. Kondisi Wilayah Kecamatan Pagelaran Utara

a. Umum

- Ibukota Kecamatan : Pekon Fajar Mulia
- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan
Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur : Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu

Rata-rata jarak dari kecamatan ke ibukota kabupaten 17 Km.

Rata-rata jarak dari kecamatan ke ibukota provinsi 57 Km.

b. Pemerintahan Kecamatan Pagelaran Utara

Aparatur pemerintah kecamatan pada saat ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemberdayaan, Kasi Trantib, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Sementara ini Kecamatan Pagelaran Utara tidak mempunyai staf.

Tabel 6. Wilayah Kecamatan Pagelaran Utara secara administratif :

NO	NAMA PEKON	KEPALA PEKON
1	FAJAR BARU	ARJUNA
2	FAJAR MULIA	SUKOCO
3	MADARAYA	AS'ARI
4	GIRI TUNGGAL	ROKYAT ROBANI
5	MARGOSARI	SARIMAN
6	SUMBER BANDUNG	HARYADI
7	KAMILIN	MUROD
8	GUNUNG RAYA	SUSILAWATI

NO	NAMA PEKON	KEPALA PEKON
9	NEGLASARI	SUHAEBI
10	WAY KUNYIR	PARMAN

Aparatur dari setiap pekon terdiri dari :

1. Kepala Pekon
2. Juru Tulis
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Umum
5. Kaur Kesra
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Pembangunan

3. Demografis dan Sosial Kecamatan Pagelaran Utara

a. Demografis

Jumlah Penduduk Laki-laki 8.105 jiwa, perempuan 7.698 jiwa.

Tabel 7. Kepadatan Penduduk Per Pekon

NO	NAMA PEKON	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK
1	FAJAR BARU	5.650	1.373
2	FAJAR MULIA	600	2.040
3	MADARAYA	350	1.384
4	GIRI TUNGGAL	449	1.867
5	MARGOSARI	4.258	3.366
6	SUMBER BANDUNG	4.093	1.745
7	KAMILIN	1.005	1.251

NO	NAMA PEKON	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK
8	GUNUNG RAYA	1.500	863
9	NEGLASARI	7.445	1.006
10	WAY KUNYIR	510	907
	JUMLAH	25.897	15.802

b. Sosial Budaya

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bunga

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH PENDUDUK	PROSENTASE
1	JAWA	5.247	33.20%
2	LAMPUNG	2.754	17.42%
3	SUNDA	6.818	43.17%
4	SEMENDO	55	0.53%
5	MADURA	-	-
6	BATAK	23	0.14%
7	PADANG	-	-
8	BETAWI	-	-
9	BALI	89	0.56%
10	BUGIS	8	0.05%
11	OKU	808	5.11%
	JUMLAH	15.802	100%

c. Pendidikan

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	PROSENTASE
1	SD	3.827	45.05%
2	SLTP	1.444	15.27%
3	SLTA	1.246	9.11%
4	D1/Sederajat	9	0.09%
5	D2/Sederajat	10	0.10%
6	D3/Sederajat	30	0.32%
7	Strata 1 (S1)	31	0.31%
8	Tidak Lulus SD	2.795	29.75%
	JUMLAH	9.392	100%

d. Kesehatan

Jumlah Puskesmas 1 unit

Jumlah Puskesmas Pembantu 1 unit

Jumlah Poskesdes 5 unit

Jumlah Posyandu 13 unit

e. Peribadatan

Tabel 10. Jumlah Penduduk Berdasarkan agama yang Dianut

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK	PROSENTASE
1	ISLAM	15.546	98.30%
2	PROTESTAN	39	0.35%
3	KHATOLIK	38	0.34%
4	HINDU	64	0.41%

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK	PROSENTASE
5	BUDHA	115	0.60%
	JUMLAH	15.802	100%

f. Perekonomian

Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH PENDUDUK	PROSENTASE
1	TANI	3.898	65.31%
2	BURUH	1.661	27.84%
3	PNS	59	0.98%
4	DAGANG	287	4.80%
5	TUKANG	64	1.07%
	JUMLAH	5.969	100%

g. Hasil Pertanian

Hasil pertanian/perkebunan :

1. Padi 559 ton/thn
2. Coklat 364 ton/thn
3. Kopi 307 ton/thn
4. Lada 9 ton/thn
5. Kelapa Sawit 1.290 ton/thn
6. Pisang 1.530 ton/thn
7. Karet 136 ton/thn
8. Jagung 65 ton/thn

h. Pariwisata

Potensi Pariwisata yang terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara :

1. Wisata Alam Curup Tujuh di pekon Sumber Bandung

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis perkembangan wilayah Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan di kecamatan Pagelaran Utara sekolah dasar memiliki jumlah yang lebih banyak di bandingkan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Sedangkan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi masih rendah. Luas daerah kecamatan Pagelaran Utara sudah memenuhi syarat administratif untuk dijadikan kecamatan baru yang minimal 5 desa untuk dijadikan daerah otonom baru. Rentang kendali atau jarak bagi masyarakat untuk ke kecamatan Pagelaran Utara sudah tidak terlalu jauh. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata jarak yang ditempuh untuk menuju pusat kecamatan adalah sekitar 3,5 km. ini memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan baik berupa administrasi maupun kebijakan lain yang akan lebih merata dirasakan oleh masyarakat serta dipermudah dengan akses jalan yang mulai membaik. Sarana maupun prasarana di kecamatan Pagelaran Utara sudah mulai mengalami peningkatan. Salah satu adanya fasilitas kesehatan rawat inap yang setidaknya dapat membantu masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.

2. Hasil uji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara berdasarkan indikator yang digunakan melalui uji *chi-square goodness of fit* menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara. Sedangkan untuk indikator luas wilayah dan sarana prasarana ibadah hasil uji hipotesis menyatakan tidak terdapat perbedaan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis perkembangan wilayah Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu :

1. Dalam hal tingkat pendidikan, di Kecamatan Pagelaran Utara yang belum lama terbentuk ini dikatakan tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Pagelaran. Walaupun sarana dan prasarannya dinilai masih kurang memadai dan tenaga pengajar yang belum optimal. Fasilitas kesehatan cukup memadai, namun masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat kekurangan seperti kurangnya tenaga medis ahli dan jam operasional yang minim.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kecamatan Pagelaran Utara, mengingat akses untuk menuju kepusat kecamatan masih belum baik. Seperti belum adanya penerangan jalan maupun rambu-rambu lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.

3. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat sehingga dapat mengenalkan program-program pemerintah yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat pada lembaga desa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Rulam. 2016 *Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*.

Yogyakarta. Ar-Ruzz Media

Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPI Press

Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Lucas, David. 1990. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta. UGM Press.

Morrisan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Prenada Media Grup

Munir, Rozy. 1986. *Teori-Teori Kependudukan*. Jakarta. Bina Aksara

Paskarina, Caroline dan Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta. C.V Andi Offset

- Rusli, Said. 1983. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta. LP3ES
- S.H., Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta:
Pustaka Sinar
- Simanjuntak, Bungaran Antonius.2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia:Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*.
Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sulaiman, Wahid. 2003. *Statistik Non-Parametrik Contoh Kasus dan Pemecahannya dengan SPSS*. Yogyakarta. Andi
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tambunan, Mangara. 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*.
Yogyakarta. Graha Ilmu
- Warpani, Suwardjoko. 1980. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung. itb

Website

<http://www.bappenas.go.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2015

Peraturan :

Perpres No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Perkab No. 12 Tahun 2012

UU No. 22 Tahun 1999